

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2015 -2023

Mochammad Fitrah Muttaqin¹

Universitas Negeri Surabaya¹

Email korespondensi: mohammad.23465@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Surabaya City Government in managing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) from 2015 to 2023. The research applies a descriptive quantitative approach using regional financial ratio analysis, including efficiency, effectiveness, fiscal independence, degree of decentralization, and the balance between capital and operational expenditures. The results indicate that the financial efficiency of the Surabaya City Government fluctuated, with inefficiency observed in several years, especially during the COVID-19 pandemic. Nevertheless, the effectiveness of Local Own-Source Revenue (PAD) was relatively high, with revenue targets largely met or exceeded. Surabaya also demonstrated strong fiscal independence, as shown by favorable independence and decentralization ratios. However, the dominance of operational expenditure suggests a need for better budget allocation balance to support infrastructure development and long-term investment, particularly in the post-pandemic era.

Keywords: *Financial Performance; APBD; Efficiency; Effectiveness; Fiscal Independence*

1. PENDAHULUAN

Kota Surabaya, sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan budaya di Jawa Timur, memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah dan nasional, sehingga dituntut untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan dan efektif. APBD menjadi instrumen vital dalam menjalankan fungsi pemerintahan, membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan APBD menghadapi beragam tantangan, termasuk ketidakpastian ekonomi, bencana alam, pandemi global, dan perubahan kebijakan yang cepat. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 secara signifikan mengganggu realisasi anggaran dan kinerja keuangan daerah secara menyeluruh, menunjukkan kerentanan terhadap faktor eksternal.

Analisis kinerja keuangan daerah menjadi esensial untuk memastikan alokasi dana pemerintah digunakan secara efektif, mencapai tujuan yang ditetapkan, dan efisien, mencapai tujuan dengan biaya minimal atau hasil maksimal. Hal ini bertujuan untuk memastikan dana publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kemandirian keuangan daerah, yang diukur dari kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat, merupakan fokus penting. Ketergantungan yang rendah pada transfer pusat memungkinkan fleksibilitas anggaran yang lebih besar dan penyesuaian program sesuai prioritas lokal. Meskipun Surabaya maju, indikator seperti alokasi belanja modal yang masih rendah dan efisiensi pengeluaran yang belum optimal menunjukkan perlunya evaluasi berkala dan perbaikan.

Dampak pengelolaan anggaran tercermin dalam kehidupan sehari-hari; jalan rusak yang tidak diperbaiki mengganggu transportasi dan ekonomi, sementara pembangunan yang tepat waktu melancarkan mobilitas. Demikian pula, alokasi anggaran yang tidak tepat dalam pendidikan dan kesehatan dapat menurunkan kualitas layanan esensial tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar masalah angka dalam laporan, melainkan tentang bagaimana dana digunakan untuk membangun kota, menyediakan layanan, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Surabaya, sebagai kota besar, bertanggung jawab atas dana dari pajak, retribusi, dan bantuan pusat, serta harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Perubahan global, seperti pandemi, berdampak pada penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi indikator utama kemandirian finansial. Mempelajari dinamika ini memberikan gambaran jelas tentang kondisi keuangan daerah dan langkah-langkah peningkatan pengelolaan anggaran di masa depan, tidak hanya dari efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dampaknya pada masyarakat.

Belanja operasional yang dominan mengindikasikan fokus pada kegiatan rutin daripada investasi jangka panjang seperti infrastruktur atau pengembangan SDM, yang sebenarnya memberikan manfaat lebih besar. Sebaliknya, belanja modal yang rendah menghambat pembangunan fisik. Pandemi juga mengajarkan pentingnya fleksibilitas anggaran untuk kebutuhan darurat, diimbangi dengan kontrol ketat untuk menghindari penyalahgunaan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah tentang tanggung jawab kepada masyarakat, karena dana berasal dari pajak rakyat. Partisipasi masyarakat melalui media, LSM, atau forum diskusi sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi seperti e-budgeting dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mengurangi risiko korupsi, meskipun adopsinya memerlukan komitmen kuat dan peningkatan kapasitas aparatur.

Penelitian ini relevan untuk memahami kinerja keuangan APBD Kota Surabaya periode 2015-2023, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta sebagai pertimbangan kebijakan di masa depan. Meskipun PAD Surabaya meningkat, kontribusi sumber PAD lain masih stagnan, dan pertumbuhan PAD fluktuatif, menunjukkan perlunya evaluasi efektivitas pengelolaan keuangan dalam menghadapi kondisi eksternal tak terduga. Tinjauan belanja modal juga menunjukkan prioritas pembangunan yang belum optimal, berlawanan dengan prinsip *value for money* dalam manajemen keuangan publik.

2. METODE PENELITIAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara transparan dan akuntabel. Proses ini melibatkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan informasi publik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah sering diukur menggunakan berbagai rasio, seperti rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio-rasio ini membantu pemerintah daerah mengevaluasi pengelolannya sesuai prinsip

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kinerja keuangan didefinisikan sebagai hasil terukur dari program dan kegiatan terkait penggunaan anggaran daerah.

Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan proses krusial untuk memastikan program yang direncanakan tercapai. Proses ini juga menjamin bahwa program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi yang menyeluruh dan transparan penting agar publik dapat menilai penggunaan dana mereka.

Pengelolaan keuangan daerah melibatkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi. Akuntabilitas berarti setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan, sementara transparansi memastikan informasi keuangan dapat diakses publik. Partisipasi masyarakat memungkinkan input dalam pengambilan keputusan, dan efisiensi memastikan alokasi sumber daya optimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pilar utama kemandirian keuangan daerah. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peningkatan PAD menunjukkan kemampuan daerah membiayai sendiri kebutuhannya dan mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat, yang menjadi indikator penting dalam analisis kinerja keuangan.

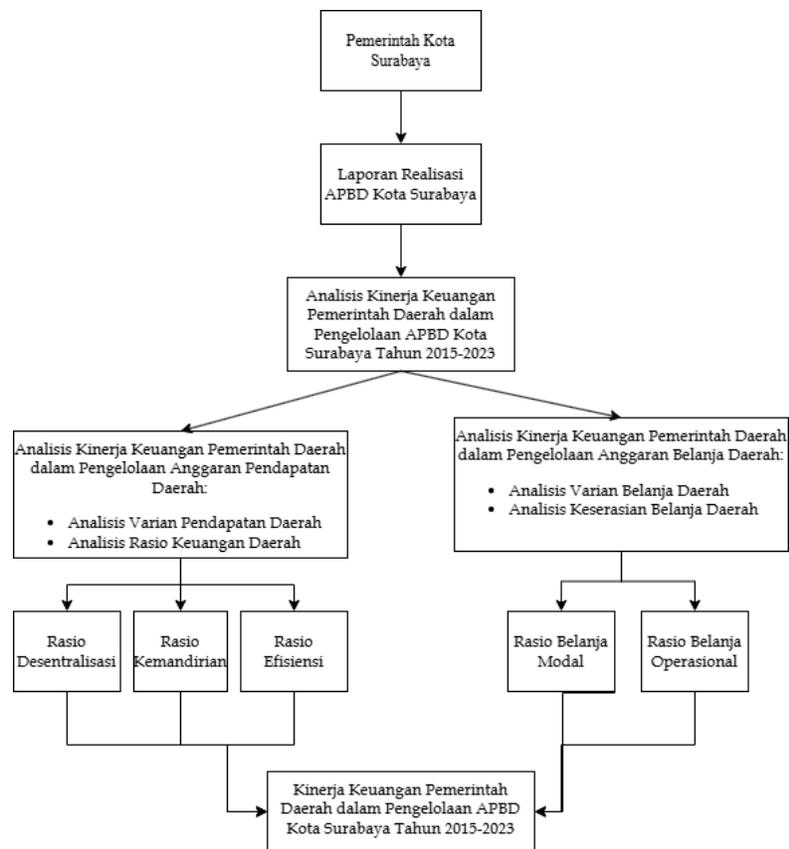
Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Belanja operasi digunakan untuk kebutuhan rutin seperti gaji pegawai, sementara belanja modal untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur. Klasifikasi ini mempermudah identifikasi tren dan pola dalam pengelolaan keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang menjadi alat utama pemerintah daerah. APBD digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, membangun infrastruktur, dan memberikan layanan publik. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Penelitian terdahulu yang relevan meliputi analisis rasio keuangan daerah di berbagai kabupaten di Indonesia. Hasilnya bervariasi; beberapa menunjukkan kinerja baik dalam efektivitas PAD, sementara yang lain menunjukkan pertumbuhan pendapatan fluktuatif dan belanja operasional yang dominan. Studi-studi ini memberikan konteks penting bagi penelitian yang sedang dilakukan.

Kerangka berpikir penelitian ini adalah struktur konseptual yang menjelaskan hubungan antar konsep kunci. Konsep utamanya meliputi kemandirian keuangan daerah, efisiensi penggunaan anggaran, rasio belanja modal dan operasional, serta pertumbuhan pendapatan. Ini semua terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dan pengelolaan APBD.

Hubungan antara konsep-konsep ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang baik dicapai melalui pengelolaan anggaran yang mandiri, efektif, dan efisien. Model kerangka berpikir mengaitkan pendapatan daerah dengan efektivitas PAD dan pengelolaan mandiri. Hal ini juga menghubungkan pengeluaran dengan efisiensi belanja dan optimasi anggaran, serta belanja modal dan operasional dengan alokasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan karakteristik populasi atau area tertentu. Dalam konteks studi ini, penelitian berfokus pada analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya secara komprehensif.

Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini secara khusus melibatkan penggunaan data numerik dan analisis statistik yang mendalam. Penggunaan angka dan rasio memungkinkan identifikasi tren dan pola yang objektif dalam data keuangan. Metode ini memberikan dasar yang kuat untuk pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, sehingga tidak memerlukan pengumpulan langsung di lapangan. Sumber utama dari data ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya.

Data sekunder yang dikumpulkan secara spesifik meliputi Laporan Realisasi APBD Kota Surabaya dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain itu, data ekonomi dan keuangan lain yang relevan juga diperoleh dari sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya. Kelengkapan data ini sangat krusial untuk analisis yang akurat.

Periode tahun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari 2015 hingga 2023. Pemilihan rentang waktu ini memungkinkan analisis tren kinerja keuangan dalam jangka waktu

yang cukup panjang. Periode ini juga mencakup dampak dari peristiwa besar seperti pandemi COVID-19, yang memberikan konteks penting bagi analisis.

Sumber data juga mencakup berbagai publikasi resmi pemerintah daerah dan pusat. Publikasi ini digunakan sebagai referensi penting untuk membangun landasan teori dan kerangka pemikiran penelitian. Penggunaan sumber-sumber kredibel ini memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat kredibilitas dan relevansi yang tinggi terhadap topik penelitian.

Lokasi penelitian ini secara spesifik adalah di Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemilihan lokasi ini sangat strategis karena Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Kota ini memiliki dinamika pengelolaan keuangan daerah yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih dalam.

Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah (RKED) didefinisikan sebagai perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan pada awal periode anggaran. Rasio ini secara langsung mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya. Tingginya rasio ini mengindikasikan pengelolaan pendapatan yang baik.

Menurut Mahsun (2012), kriteria efisiensi keuangan daerah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan persentase efisiensinya. Jika persentase efisiensi lebih dari 100%, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai tidak efisien, karena menunjukkan bahwa input yang digunakan melebihi output yang dihasilkan. Selanjutnya, apabila persentase efisiensi sama dengan 100%, maka kondisi tersebut disebut efisien berimbang, yang berarti antara input dan output berada pada tingkat yang seimbang. Sementara itu, jika persentase efisiensi kurang dari 100%, maka hal tersebut dikategorikan sebagai efisien, karena menunjukkan bahwa daerah mampu menghasilkan output dengan penggunaan input yang relatif lebih sedikit.

$$RKED = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur dari kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sesuai target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas ini, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah. Rasio ini adalah indikator kunci kemandirian fiskal.

Menurut Mahsun (2012), kriteria efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai berdasarkan persentase capaian efektivitas. Apabila persentase efektivitas melebihi 100%, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai efektif, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD melampaui target yang telah ditetapkan. Jika persentasenya tepat 100%, maka dikatakan efektif berimbang, yang berarti realisasi PAD sesuai dengan target yang direncanakan. Sementara itu, apabila persentase efektivitas kurang dari 100%, maka PAD dianggap tidak efektif, karena realisasi penerimaan belum mencapai target yang ditentukan.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \quad (2)$$

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) mengukur seberapa besar kemampuan suatu daerah untuk membiayai pengeluarannya sendiri. Pengukuran ini didasarkan pada pendapatan asli daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat. Rasio ini secara langsung menunjukkan tingkat otonomi fiskal yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Menurut Halim (2001), rasio kemandirian daerah dibagi ke dalam empat kategori. Rasio antara >0%–25% dikategorikan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Rasio >25%–50% disebut rendah dengan pola konsultatif. Rasio >50%–75% termasuk sedang dengan pola partisipatif, sedangkan rasio >75%–100% menunjukkan kemandirian tinggi dengan pola hubungan delegatif.

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\% \quad (3)$$

Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi Fiskal mengindikasikan tingkat pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Rasio ini terkait erat dengan konsep kemandirian keuangan daerah. Tingginya derajat desentralisasi mencerminkan kemandirian yang lebih besar dalam pengambilan keputusan fiskal lokal.

Menurut Susilawati dkk (2018), derajat desentralisasi diklasifikasikan berdasarkan persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan. Persentase 0%–10% dikategorikan sangat kurang, 10%–20% kurang, 20%–30% cukup, 30%–40% sedang, 40%–50% baik, dan di atas 50% menunjukkan desentralisasi yang baik sekali.

$$\text{DD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \quad (4)$$

Rasio Kekeragaman

Rasio Kekeragaman Belanja Modal dan Belanja Operasional menganalisis proporsi antara belanja untuk investasi jangka panjang (belanja modal) dan belanja untuk kebutuhan rutin (belanja operasional). Rasio ini sangat penting untuk menilai prioritas pembangunan daerah. Proporsi yang sehat antara kedua jenis belanja ini menunjukkan alokasi sumber daya yang strategis untuk pertumbuhan dan keberlanjutan.

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, persentase belanja operasional dikategorikan ke dalam tiga tingkatan. Jika kurang dari 40%, maka tergolong baik. Persentase antara 40% hingga 80% dinilai cukup baik, sedangkan jika melebihi 80% maka dikategorikan kurang baik.

Menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, kriteria belanja modal dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika persentasenya lebih dari 40%, maka tergolong baik. Pada kisaran 10% hingga 40%, dikategorikan cukup baik, sedangkan jika kurang dari 10%, maka termasuk kurang baik.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (5)$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (6)$$

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan daerah. Data yang terkumpul dari berbagai sumber kemudian diolah dan dihitung secara cermat menggunakan rumus-rumus rasio yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis didasarkan pada perhitungan yang standar dan dapat diverifikasi.

Setelah perhitungan rasio selesai, hasilnya kemudian diinterpretasikan secara mendalam untuk menarik kesimpulan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Interpretasi ini melibatkan perbandingan dengan standar yang berlaku atau tren yang terlihat pada periode sebelumnya. Proses ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi keuangan daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi pendapatan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan. Dari tahun 2015 hingga 2019, rasio efisiensi keuangan kota surabaya menunjukkan fluktuasi, namun umumnya berada dalam kategori "tidak efisien." Kondisi ini mengindikasikan bahwa target pendapatan yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan data yang diolah, efisiensi keuangan Kota Surabaya selama periode 2015 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, 2017, 2021, dan 2023, rasio efisiensi berada di bawah 100%, sehingga dikategorikan efisien. Tahun 2018 menunjukkan rasio efisiensi sebesar 100%, yang tergolong efisien berimbang. Sementara itu, pada tahun 2016, 2019, 2020, dan 2022, rasio efisiensi melebihi 100%, sehingga termasuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun, pengelolaan keuangan belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan output sesuai input anggaran yang tersedia.

Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan signifikan dalam rasio efisiensi, yang sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas ekonomi menyebabkan penurunan penerimaan daerah yang drastis, sehingga target pendapatan menjadi sulit tercapai. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan penerimaan di tengah krisis yang tidak terduga.

Meskipun demikian, pada tahun 2022 dan 2023, rasio efisiensi menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Peningkatan ini mencerminkan upaya

pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Pemulihan ini menunjukkan ketahanan ekonomi kota terhadap guncangan eksternal yang signifikan.

Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Secara umum, rasio efektivitas PAD Kota Surabaya selama periode 2015-2023 menunjukkan kinerja yang "sangat efektif." Ini berarti realisasi PAD cenderung melebihi atau setidaknya mendekati target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang diolah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama periode 2015 hingga 2023 menunjukkan adanya penurunan kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015 hingga 2019, rasio efektivitas PAD selalu berada di atas 100%, sehingga dikategorikan efektif. Namun, mulai tahun 2020 hingga 2023, rasio tersebut berada di bawah 100%, yang berarti tidak efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi PAD tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut.

Tingginya efektivitas PAD menunjukkan potensi kuat Kota Surabaya dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Hal ini mencerminkan upaya intensif dalam pengumpulan pajak dan retribusi dari berbagai sektor. Konsistensi dalam pencapaian target PAD adalah indikator positif pengelolaan fiskal yang berjalan dengan baik.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah membiayai pengeluarannya sendiri dari PAD tanpa bergantung pada transfer pemerintah pusat. Sepanjang periode penelitian, rasio kemandirian Kota Surabaya umumnya berada dalam kategori "mandiri" atau "cukup mandiri." Ini menandakan tingkat otonomi fiskal yang relatif baik.

Selama periode 2015 hingga 2023, rasio kemandirian keuangan Kota Surabaya menunjukkan angka yang konsisten tinggi, dengan persentase selalu berada di atas 100%. Berdasarkan kriteria yang digunakan, kondisi ini menempatkan Kota Surabaya dalam kategori kemandirian tinggi dengan pola hubungan delegatif. Artinya, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri tanpa ketergantungan signifikan pada bantuan pemerintah pusat.

Meskipun ada beberapa fluktuasi minor, tren kemandirian yang positif ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki fondasi fiskal yang cukup kuat. Ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat relatif rendah. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi fiskal mengukur seberapa besar kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri. Mirip dengan rasio kemandirian, derajat desentralisasi Kota Surabaya berada pada tingkat yang baik sepanjang periode analisis. Ini secara jelas menunjukkan bahwa sebagian besar keuangan daerah dikelola secara mandiri oleh pemerintah kota.

Selama periode 2015 hingga 2023, derajat desentralisasi Kota Surabaya menunjukkan tren yang sangat positif. Sebagian besar tahun menunjukkan persentase di atas 50%, yang menurut kriteria tergolong dalam kategori "baik sekali". Hanya pada tahun 2016, derajat desentralisasi

tercatat sebesar 50%, yang masih berada dalam kategori "baik". Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai urusan pemerintahannya sendiri semakin kuat, mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi.

Tingginya derajat desentralisasi secara signifikan mendukung otonomi daerah yang lebih besar. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan prioritas lokal warganya. Otonomi ini krusial untuk mewujudkan pembangunan yang relevan dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik daerah.

Rasio Kecerassian Belanja

Rasio keserasian menganalisis proporsi antara belanja modal (investasi) dan belanja operasional (rutin). Selama periode penelitian, belanja operasional di Kota Surabaya selalu menunjukkan dominasi yang signifikan dibandingkan dengan belanja modal. Ini secara jelas menunjukkan prioritas pada pengeluaran rutin daripada investasi jangka panjang.

Dominasi belanja operasional dapat mengindikasikan kurangnya alokasi dana yang memadai untuk pembangunan infrastruktur dan aset-aset publik baru yang vital. Meskipun belanja operasional sangat penting untuk fungsi pemerintahan sehari-hari, keseimbangan yang tidak proporsional ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan penyediaan fasilitas publik yang memadai bagi masyarakat.

Tabel 11. Rasio Belanja Operasional Kota Surabaya

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (%)	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi (%)	Kriteria
2015	4.705.234.504.032	6.490.359.759.532	72%	Cukup Baik
2016	5.362.267.504.603	7.151.661.549.430	75%	Cukup Baik
2017	5.394.517.494.011	7.912.409.152.257	68%	Cukup Baik
2018	5.731.527.814.355	8.176.929.496.299	70%	Cukup Baik
2019	6.404.557.852.974	9.162.655.939.832	70%	Cukup Baik
2020	6.439.039.886.246	8.032.680.988.065	80%	Kurang Baik
2021	6.771.433.976.328	7.819.077.321.546	87%	Kurang Baik
2022	7.679.441.144.734	9.448.236.778.684	81%	Kurang Baik
2023	7.858.879.310.451	9.543.590.902.935	82%	Kurang Baik

Sumber: Data diolah

Tabel 12. Rasio Belanja Modal Kota Surabaya

Tahun	Realisasi Belanja Modal (%)	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal (%)	Kriteria
2015	1.785.125.255.500	6.490.359.759.532	28%	Cukup Baik
2016	1.789.394.044.827	7.151.661.549.430	25%	Cukup Baik
2017	2.517.891.658.246	7.912.409.152.257	32%	Cukup Baik
2018	2.430.061.039.309	8.176.929.496.299	30%	Cukup Baik
2019	2.754.304.824.082	9.162.655.939.832	30%	Cukup Baik
2020	1.583.663.159.605	8.032.680.988.065	20%	Cukup Baik
2021	1.016.336.503.390	7.819.077.321.546	13%	Cukup Baik
2022	1.766.030.466.528	9.448.236.778.684	19%	Cukup Baik
2023	1.671.895.816.185	9.543.590.902.935	18%	Cukup Baik

Sumber: Data diolah

4. KESIMPULAN

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya secara keseluruhan menunjukkan campuran antara kekuatan yang menonjol dan area-area yang masih memerlukan peningkatan serius. Efektivitas PAD dan kemandirian fiskal adalah kekuatan utama yang menunjukkan potensi penerimaan daerah yang solid dan berkelanjutan. Aspek ini patut dipertahankan dan ditingkatkan.

Namun, tantangan utama terletak pada efisiensi pendapatan dan keseimbangan belanja yang belum optimal. Meskipun target PAD sering tercapai atau terlampaui, proses pengumpulannya mungkin belum sepenuhnya efisien atau target awal mungkin terlalu konservatif. Penyesuaian target pendapatan perlu dilakukan untuk mencerminkan potensi riil daerah secara lebih akurat dan ambisius.

Pandemi COVID-19 secara jelas menunjukkan kerentanan kinerja keuangan daerah terhadap guncangan eksternal yang tak terduga. Penurunan efisiensi pendapatan yang signifikan pada tahun 2020-2021 menggarisbawahi perlunya strategi mitigasi risiko fiskal yang lebih kuat. Diversifikasi sumber pendapatan juga menjadi sangat penting untuk meningkatkan ketahanan fiskal di masa depan. Fleksibilitas anggaran menjadi kunci dalam menghadapi krisis tak terduga.

Dominasi belanja operasional merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Meskipun penting untuk menjaga operasional sehari-hari, belanja operasional yang sangat besar tanpa diimbangi oleh belanja modal yang memadai dapat secara signifikan memperlambat pertumbuhan infrastruktur dan investasi publik. Ini menghambat potensi pengembangan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan belanja modal tidak hanya menciptakan aset fisik yang berwujud, tetapi juga secara langsung merangsang aktivitas ekonomi secara lebih luas. Selain itu, investasi modal juga memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan. Menggeser prioritas belanja ke arah modal membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan komitmen politik yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang sangat signifikan bagi Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan target pendapatan yang lebih realistis dan proaktif, sesuai dengan potensi ekonomi kota. Selain itu, upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan efisiensi dalam setiap pengeluaran harus terus dilakukan secara konsisten dan terukur.

Fokus juga harus diberikan secara intensif pada peningkatan alokasi belanja modal. Ini penting untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan untuk membiayai program-program yang secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Diversifikasi sumber-sumber pendapatan juga akan secara signifikan meningkatkan ketahanan fiskal daerah terhadap fluktuasi ekonomi.

Secara keseluruhan, analisis ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kesehatan fiskal Pemerintah Kota Surabaya selama periode penelitian. Rekomendasi yang dihasilkan dari studi ini diharapkan dapat menjadi panduan yang konkret dan relevan bagi pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang, demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk Pemerintah Kota Surabaya. Pertama, pemerintah perlu mempertimbangkan penetapan target pendapatan yang lebih realistis dan proaktif, serta meningkatkan upaya dalam mengoptimalkan efisiensi pengumpulan pendapatan. Hal ini dapat dicapai melalui inovasi dalam sistem pajak dan retribusi, serta peningkatan pengawasan.

Kedua, sangat disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran belanja modal secara signifikan. Peningkatan ini harus diiringi dengan perencanaan yang matang untuk memastikan investasi tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Fokus pada proyek-proyek strategis jangka panjang sangat krusial.

Ketiga, Pemerintah Kota Surabaya perlu mengembangkan strategi mitigasi risiko fiskal yang lebih komprehensif untuk menghadapi guncangan eksternal di masa mendatang, seperti pandemi atau krisis ekonomi. Diversifikasi sumber pendapatan daerah juga akan menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan fiskal. Ini akan memperkuat fondasi keuangan kota.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, fokus penelitian hanya pada Kota Surabaya, sehingga temuan dan kesimpulan mungkin tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke daerah lain dengan karakteristik ekonomi dan fiskal yang berbeda. Setiap daerah memiliki dinamikanya sendiri.

Kedua, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang dipublikasikan oleh instansi pemerintah, yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal detail atau kelengkapan data tertentu. Akses terhadap data internal atau wawancara mendalam dengan pihak pengelola keuangan daerah dapat memberikan wawasan yang lebih kaya.

Ketiga, analisis ini sebagian besar bersifat deskriptif kuantitatif menggunakan rasio keuangan. Meskipun efektif dalam memberikan gambaran umum, pendekatan ini mungkin tidak sepenuhnya menangkap faktor-faktor kualitatif yang juga memengaruhi kinerja keuangan. Faktor-faktor seperti kualitas tata kelola atau kebijakan spesifik tidak dianalisis secara mendalam.

Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup dengan melakukan studi komparatif. Studi ini dapat membandingkan kinerja keuangan Kota Surabaya dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia atau bahkan di Asia Tenggara. Perbandingan ini akan memberikan perspektif yang lebih luas.

Selain itu, penelitian di masa depan dapat mengintegrasikan pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan dan pelaksana anggaran. Hal ini akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor non-finansial yang memengaruhi kinerja keuangan. Pemahaman yang lebih holistik akan sangat berharga.

Penelitian selanjutnya juga dapat fokus pada dampak spesifik dari alokasi belanja modal terhadap indikator pembangunan ekonomi dan sosial. Misalnya, menganalisis hubungan antara investasi infrastruktur dengan peningkatan PDRB atau penurunan tingkat kemiskinan. Studi ini akan memberikan bukti empiris tentang efektivitas investasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2001). *Akuntansi sektor publik*. BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Digdowiseiso, K., & Alfian, M. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bima tahun anggaran 2017–2021. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 247–258.
- Djarwanto, P. S. (2001). *Pokok-pokok analisa laporan keuangan* (Edisi pertama, Cetakan kedelapan). BPFE.
- Halim. (2002). *Seri akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Hamzah, A. (2008). Pengaruh belanja dan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. *Konferensi Penelitian Jawa Timur*.
- Julaeha, R. S., & Penangsang, P. (2024). Analisis rasio keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2019–2023. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(1).
- Mandua, T. L., Numberi, C. L., & Werimon, S. (2022). Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Teluk Wondama periode 2017–2021. *Jurnal Lensa Ekonomi*, 16(2), 237–253.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mahmudi. (2010). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi kedua). STIM YKPN.
- Munawir. (2001). *Akuntansi keuangan dan manajemen* (Edisi pertama). BPFE.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). *Akuntansi pemerintahan*. Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rantebalik, B., Tawakkal, & Sutrisna, A. (2016). Analisis kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 192–206.
- Sartika, N. (2019). Analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kepulauan Meranti. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(19), 147–153.
- Simanjuntak, P. J. (2001). *Ekonomi sumber daya manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sriningsih, S., Ismiwati, Bq., & Sayuti, M. (2021). Analisis keserasian belanja modal dan belanja operasional pada keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 39–55.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Widodo. (2001). *Analisa rasio keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali manajemen keuangan daerah*. UPP AMP YKPN.
- Zuhdi, F. I. N., Mawardi, M. C., & Hidayati, I. (2023). Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan tahun 2019–2021. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(2), 721–728.